



Media: Radar

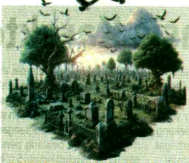
Hari: Rabu

Tanggal: 07 Mei 2025

Halaman: 6



PENUH: Kondisi makam di wilayah Kota Jogja yang sudah padat dengan batu nisan. Menandakan tidak adanya lahan tersisa untuk pemakaman.



PERMASALAHAN MAKAM

- Lonjakan penduduk dan urbanisasi
- Makam penuh, kurang terawat, dan tumpang tindih
- Akses lokasi yang tidak tertata
- Belum ada kepastian hukum

Raperda Pemakaman adalah fondasi penting untuk penyelenggaraan pemakaman yang tertib dan berkeadilan bagi semua pihak.

Anggota Komisi C DPRD Kota Jogja Taufiq Setiawan Wujudkan Pengelolaan Pemakaman Tertib dan Berkelanjutan

Anggota Komisi C DPRD Kota Jogja sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pemakaman Taufiq Setiawan cukup konsen mewujudkan regulasi pemakaman yang tertib, aman, dan berkelanjutan. Sehingga, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini pun mendorong agar peraturan daerah tersebut segera terwujud.

TAUFIQ mengatakan, raperda terkait pemakaman sudah seharusnya diwujudkan. Sebagai solusi

buruknya pengelolaan pemakaman di Kota Jogja selama ini. Sekaligus menjadi jawaban atas

keterbatasan lahan pemakaman di wilayah perkotaan.

Dia menyebut, urbanisasi dan lonjakan penduduk memang menjadi salah satu unsur pemicu minimnya ketersediaan lahan pemakaman di Kota Jogja. Namun di satu sisi, pengelolaan lahan



Urbanisasi dan lonjakan jumlah penduduk memicu krisis lahan pemakaman di Jogja."

TAUFIQ SETIAWAN
Anggota Komisi C DPRD Kota Jogja

pemakaman belum optimal. Misalnya makam yang penuh, kurang terawat, hingga penggunaan yang tumpang tindih.

Oleh karena itu, adanya perda diharapkan dapat menjadi dasar aturan yang jelas bagi pemerintah maupun masyarakat. Sehingga ke depan dapat mengantisipasi penyimpangan dalam hal pengelolaan pemakaman.

"Urbanisasi dan lonjakan jumlah penduduk memicu krisis lahan pemakaman di Jogja. DPRD menilai situasi ini mendesak untuk diatur dalam kebijakan yang jelas dan berpihak pada kepentingan masyarakat," ujar Taufiq kemarin (6/5).

Dalam proses penyusunan raperda, legislatif juga

mendorong partisipasi aktif masyarakat agar aturan dapat disesuaikan dengan kondisi lokal. Sekaligus bisa melakukan pengawasan agar aturan bisa berjalan efektif di lapangan.

Taufiq menilai, aturan yang jelas juga dapat memastikan hak setiap warga negara untuk dimakamkan secara layak dan sesuai dengan ketentuan berlaku. Sehingga tidak ada lagi diskriminasi dalam proses pemakaman.

Jika aturan pemakaman tidak jelas, lanjutnya, dikhawatirkan dapat berdampak pada lokasi yang tidak teratur. Misalnya menyebabkan masalah lahan yang tidak tertata, akses sulit, atau bahkan potensi sengketa lahan.

Adanya aturan, dapat memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara pemakaman, keluarga yang berduka, maupun masyarakat umum. Hal tersebut juga memudahkan aparat berwenang dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum jika memang terjadi pelanggaran.

"Singkatnya, Raperda Pemakaman dengan aturan yang jelas adalah fondasi penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemakaman yang layak, tertib, sehat, menghormati nilai-nilai sosial budaya, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak," beber Taufiq. (*/inu/emo/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005